



PEMERINTAH KOTA MALANG

# LAPORANKINERJA TAHUN 2022

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**MARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP.19790709 199810 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum	1
B. Isu-Isu Strategis	7
<b>BAB II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>9</b>
A. Perencanaan Kinerja	9
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja	13
D. Standar Penilaian	15
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	43
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>48</b>
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022	vi
Tabel 2	Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja , Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022	vi
Tabel 2.1.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023	11
Tabel 2.2.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023	13
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	17
Tabel 3.2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	20
Tabel 3.3.	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	23
Tabel 3.4.	Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya	23
Tabel 3.5.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	27
Tabel 3.6.	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	30
Tabel 3.7.	Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan	32
Tabel 3.8.	Realisasi Anggaran Tahun 2022	43

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- Lampiran 4. Bukti Dukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 5. Penghargaan tahun 2022

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang berfungsi sebagai media dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Laporan kinerja ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintegrasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum tercapai dengan sangat berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 90,32%. Adapun pencapaian sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 9 program, 20 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Adapun hasil pengukuran dapat dijelaskan berikut ini:

**Tabel 1**  
**Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja,**  
**Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2022**

Rentang Capaian (%)	Pencapaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil	1	1
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil	3	4
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil	1	1
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil	0	0

Secara umum kategori sangat berhasil, tercapai/berhasil atau cukup tercapai ini disumbangkan oleh kinerja atas program, kegiatan dan sub kegiatan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas permasalahan yang terjadi, sehingga diketahui penyebab munculnya permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja.

Adapun kinerja pencapaian sasaran di bidang ketenagakerjaan , penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2**  
**Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja,**  
**Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	70	11,92	17,03%	
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,9 %	4,87%	124,91%	
	Rata-rata capaian sasaran 1			70,97%	
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	94,10%	92,34%	98,13%	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3,8	3,67	96,58%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89	87,46	98,27%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,80	87,50	106,97%	

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pencapaian kinerja, dimana dalam hal ini tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Perizinan. Oleh karena itu, pada perencanaan strategisnya Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada tahun 2021 merencanakan sebanyak 9 program, 20 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 8 program, 19 kegiatan dan 34 sub kegiatan.



Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Dalam tahun 2022, telah dipergunakan anggaran dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp.18.184.223.486 dari anggaran sebesar Rp. 20.380.139.471 atau mencapai 89,23 %
2. Realisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 67 orang per 31 Desember 2022.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari laporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan kedepan. Menyadari hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah mempersiapkan strategi-strategi pembenahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.

# BABI PENDAHULUAN



## A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*". Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam program kegiatan Tahun Anggaran 2022 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### 1. *Dasar Hukum*

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d. Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - e. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
  - f. Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - g. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - h. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

## **2. Maksud dan tujuan.**

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2022.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

## **3. Kelembagaan**

### **a. Pembentukan Organisasi**

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **b. Kedudukan Organisasi**

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **c. Struktur Organisasi**

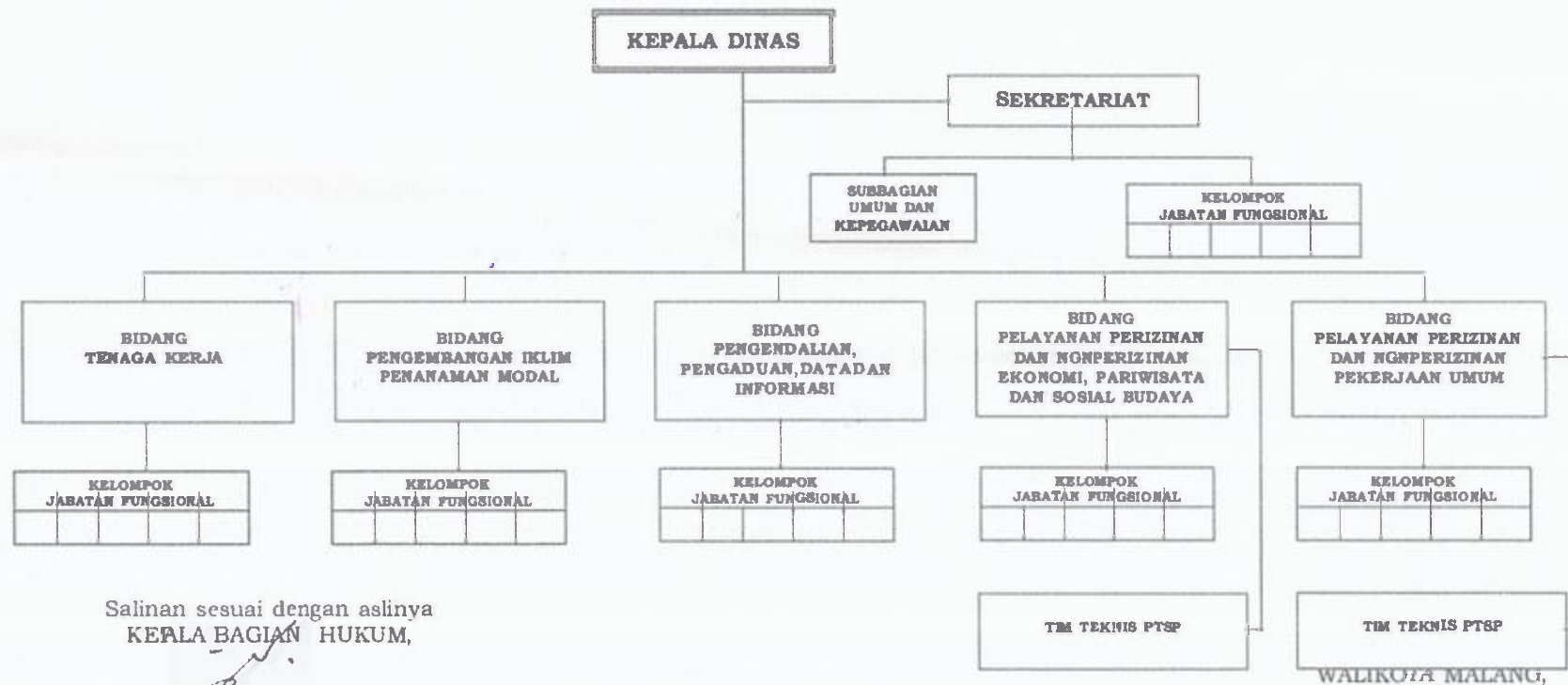
Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 37 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M. Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.  
SUTIAJI

**d. Tugas Pokok dan Fungsi**

- (1). Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
  - d. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - e. pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - f. pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
  - g. pengukuran produktivitas tenaga kerja;
  - h. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantara kerja dalam pelayanan antar kerja;
  - i. koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
  - j. koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
  - k. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;
  - l. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;

- m. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- n. penyusunan peta potensi investasi;
- o. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- p. fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
- q. pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- r. pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
- s. pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- t. pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- u. pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- v. pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
- w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- y. pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- z. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



## **B. ISU-ISU STRATEGIS**

Isu Strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tidak terlepas dari permasalahan yang selama ini muncul. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran, yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal sebagai akibat terdampaknya Covid-19 sehingga banyak pekerja yang ter-PHK;
2. Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pencari kerja;
3. Kurang relevansinya program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri/perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja sehingga perlu adanya pemetaan kebutuhan kompetensi pencari kerja;
4. Belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan, ditandai oleh hubungan industrial yang masih rentan akibat kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja;
5. Terbatasnya perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
6. Kemudahan dalam pengurusan perizinan baik izin usaha dan penanaman modal. Selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi melalui berbagai kebijakan perizinan berusaha, dimana kemudahan berusaha berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan investasi di Kota Malang.
7. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
  - a. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
  - b. Mal Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan publik



merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

8. Iklim Investasi

Kota Malang sebagai Kota yang berkembang secara pesat memiliki potensi investasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang strategis untuk meningkatkan sektor perekonomian berbasis ekonomi kreatif dan pemulihan perekonomian Kota Malang sebagai dampak pandemi Covid-19 ini melalui :

- a. Optimalisasi pemetaan potensi investasi;
- b. Optimalisasi promosi dan kerjasama kemitraan di bidang investasi;
- c. Optimalisasi layanan perizinan dan non perizinan;
- d. Optimalisasi data perizinan, non perizinan penanaman modal.
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pengusaha wajib LKPM.

9. Kualitas Pelayanan Publik.

Disnaker,PMPTSP berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang berfokus pada masyarakat, yang diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta Sistem Layanan berbasis Elektronik yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN KINERJA

Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan perencanaan kinerja baik perencanaan strategis maupun rencana kerja tahunan yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis dan rencana kerja instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2023.

#### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada akhir periode renstra adalah “Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.”

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, terdapat sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal
2. Meningkatnya Penempatan Kerja dan hubungan industrial yang kondusif.
3. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



**Tabel 2.1**  
**Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra**  
**Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65,94						72	
			Predikat WBK								75	
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	38,73	63,91	63,91	65	67	70	73	73		
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah			3,6%	3,7%	3,8%	3,9%	4,0%	4,0%		
	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja		93,21%	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%	94,40%		
	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2,5	3	3,5	3,8	4,5	4,5		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	88,5	88,8	89	89	89		
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,66	81,65	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85	81,85			



## **2. Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelaksanaan Pelatihan Kerja yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
- b. Meningkatkan perluasan Kesempatan Kerja dan kualitas perlindungan sosial bagi pekerja;
- c. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- d. Menyusun aplikasi layanan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan OPD lainnya.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Meningkatkan Jumlah Penempatan Tenaga Kerja dan hubungan industrial yang harmonis
- c. Menyusun Standar Pelayanan dan SOP pelayanan ketenagakerjaan, penanaman modal serta perizinan dan non perizinan dengan melibatkan pengguna layanan dan stakeholder terkait
- d. Menindaklanjuti layanan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB serta dan masukan dari masyarakat.
- e. Pengembangan Aplikasi Layanan Disnaker, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis elektronik
- f. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur, kewajiban dan monitoring.
- g. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kemitraan kepada dunia usaha.
- h. Pengembangan strategi promosi investasi Kota Malang yang lebih efisien dan efektif

### **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.122/2019

tentang Penetapan Indikator Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023**

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					72
		Predikat WBK					75
1.1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	63,91	65	67	70	73
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,6%	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0%
1.2	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%
1.3	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	2,5	3	3,5	3,8	4,5
1.4	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	88,5	88,8	89	89
1.5	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai

dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tujuan 1 :** Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas tenaga kerjayang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	70	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	1.785.390.734
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,9%	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0
2. Program Promosi Penanaman Modal			106.620.000	
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	94,10%	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	78.180.000
			2. Program Hubungan Industrial	212.850.000
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3,8	1. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	182.140.000
			2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal	387.935.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	1.217.901.670
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,80	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	16.409.122.067

#### D. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja yang diuraikan pada bab ini menyajikan penjelasan tentang pencapaian sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sehingga diketahui selisih kinerjanya (*performance gap*). Berdasarkan *performance gap* tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi dan efektivitas.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Kompeten dan Nilai Penanaman Modal
- Meningkatnya Penempatan Kerja dan Hubungan Industrial yang kondusif
- Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
Meningkatnya kualitas tenaga kerjayang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	70	11,92	17,03%	Tidak berhasil
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,90%	4,87%	124,91%	Sangat berhasil
	Rata-rata capaian sasaran 1			70,97%	Cukup Berhasil
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	94,10%	92,34%	98,13%	Berhasil
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3,80	3,67	96,58%	Berhasil
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89,00	87,46	98,27%	Berhasil
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,80	87,50	106,97%	Berhasil
<b>Rata-rata keberhasilan</b>				<b>94,18%</b>	<b>Berhasil</b>

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari seluruh indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 94,18% pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya.

Pada sasaran "Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal", rata-rata capaian kinerjanya sebesar 70,97% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Target rasio daya serap tenaga kerja sebesar 70, realisasi sebesar 11,92, capaian 17,03% dengan kategori "tidak berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah pekerja/buruh pada perusahaan PMDN/PMA dibagi jumlah perusahaan PMDN/PMA dikali 100%*. Adapun jumlah pekerja/buruh tahun 2022 sebesar 122.764 orang, sedangkan jumlah perusahaan PMDN/PMA tahun 2022 sebesar 10.299 perusahaan.
2. Target persentase peningkatan nilai investasi daerah sebesar 3,9%, realisasi peningkatan nilai investasi 4,87% sehingga capaian 124,91% dengan kategori "**sangat berhasil**". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah nilai investasi tahun berjalan dikurangi Jumlah nilai investasi tahun sebelumnya dibagi Jumlah nilai investasi tahun sebelumnya dikali 100%*. Adapun jumlah nilai investasi tahun 2022 sebesar 700.353.745.000 sedangkan nilai investasi tahun 2021 sebesar 667.820.200.000.

Pada sasaran "Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif", dengan indikator kinerja Rasio penduduk yang bekerja ditetapkan target sebesar 94,10%, realisasi sebesar 92,34%, capaian 98,13% dengan kategori "**berhasil**". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%*. Adapun jumlah penduduk yang bekerja adalah 418.158, sedangkan jumlah angkatan kerja adalah 452.836.

Sedangkan Pada sasaran "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik", dengan indikator kinerja Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik ditetapkan target sebesar 3,8 realisasi sebesar 3,67 capaian 96,58% dengan kategori "**berhasil**". Karena nilai evaluasi SPBE tahun 2022 belum rilis dari KemenPANRB sehingga data yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah Nilai Indeks SPBE tahun 2021.

Kemudian pada sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan", dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap layanan perizinan dan non perizinan ditetapkan target sebesar 89,00 realisasi sebesar 87,46 capaian 98,27% dengan kategori **“berhasil”**.

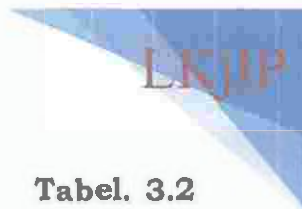
Selanjutnya pada sasaran "Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah", dengan indikator kinerja Nilai SAKIP ditetapkan target sebesar 81,80 realisasi sebesar 87,50 capaian 106,97% dengan kategori **“berhasil”**.

## **2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.**

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rasio, dan nilai. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, secara umum dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel. 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2018-2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2018	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	64,36	43,58	11,92		-	99,01%	65,05%	17,03%	
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	-	11,53%	0,00%	126,12%	4,87%		320%	0,00%	3319,05%	124,91%	
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	-	-	90,39%	90,35%	92,34%			96,67%	96,32%	98,13%	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	-	26,7	26,7	3,67	3,67		103%	89%	104,86%	96,58%	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	-	88	85,09	95,94	87,46		103%	96,14%	108,04%	98,27%	
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	82,76	84,60	87,50			101,23%	103,47%	106,97%	

Pengukuran kinerja dari tahun 2018 hingga 2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel 3.2 di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

a. Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal.

1) **Indikator kinerja 1** : Rasio daya serap tenaga kerja. Realisasi tahun 2020 sebesar 64,36 dengan capaian 99,01%, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan daya serap tenaga kerja sebesar 43,58 dengan capaian 65,05%. Pada tahun 2022 juga mengalami penurunan cukup tinggi dengan realisasi sebesar 11,92 dengan capaian 17,03% hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja sasaran kualitas tenaga kerja yang kompeten.

2) **Indikator kinerja 2** : Persentase peningkatan nilai investasi daerah. Realisasi tahun 2019 sebesar 11,53% dengan capaian 320%, realisasi tahun 2020 sebesar 0,0% dengan capaian 0,00%, realisasi tahun 2021 sebesar 126,12% dengan capaian 3319,05%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi sebesar 4,87% dengan capaian 124,91% sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2021) akan tetapi realisasi investasi tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan.

b. Sasaran strategis : Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif.

**Indikator kinerja 3** : Rasio penduduk yang bekerja. Realisasi tahun 2022 sebesar 92,34%, tahun 2021 sebesar 90,35%, untuk tahun 2020 sebesar 90,39%, sedangkan tahun 2019 belum ditetapkan indikator tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, sedangkan realisasi dan capaian tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020.

c. Sasaran strategis : Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Indikator kinerja 4** : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik. Realisasi tahun 2022 sebesar 3,67 dengan capaian 96,58%, tahun 2021 terealisasi sebesar 3,67 dengan capaian 104,86%, realisasi

tahun 2020 sebesar 2,67 dengan capaian 89% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 2,67 dengan capaian sebesar 103%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi dan capaian dari tahun 2020 dan tahun 2022 mengalami penurunan capaian dari tahun 2021.

- d. Sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

**Indikator kinerja 5** : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan. Realisasi tahun 2020 sebesar 85,09 dengan capaian sebesar 96,14%, realisasi tahun 2021 sebesar 95,94 dengan capaian sebesar 108,04%, sedangkan di tahun 2022 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,46 dengan capaian 98,27%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi dan capaian dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan realisasi dan capaian dari tahun 2021.

- e. Sasaran strategis : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Indikator kinerja 6** : Nilai SAKIP pada tahun 2020 terealisasi sebesar 82,76 dengan capaian 101,23%, tahun 2021 terealisasi sebesar 84,60 dengan capaian 103,47%, dan tahun 2022 terealisasi sebesar 87,50 dengan capaian 106,97% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian indikator tersebut mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Kinerja yang mengacu pada**  
**Target Jangka Menengah Renstra**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	73	-	64,36	43,58	11,92	
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	4,0%	11,53%	0%	126,12%	4,87%	
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	94,40%	-	90,39%	90,35%	92,34%	
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	4,5	2,67	2,67	3,67	3,67	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89	88	85,09	95,94	87,46	
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,85	-	82,76	84,60	87,50	

4. **Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya.**
- a. **Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

**Tabel 3.4**  
**Realisasi kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/**  
**Standar Nasional lainnya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
			Kinerja 2022	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	2	4	5	6
	<b>NIHIL</b>				



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, urusan Tenaga Kerja dan urusan Penanaman Modal menjadi urusan wajib non pelayanan dasar sehingga Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM).

**b. Realisasi kinerja dengan mengacu pada standar nasional/provinsi (Benchmarking kinerja)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi 2022	
				Kementerian	Provinsi
1	2	2	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	11,92	-	-
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	4,87%	-	-
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	92,34%	-	-
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik	3,67	-	-
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	87,46	-	88,47
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	87,50	-	-

Capaian kinerja indikator urusan tenaga kerja yaitu Rasio daya serap tenaga kerja dan Rasio penduduk yang bekerja tidak dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia karena terdapat perbedaan indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Indikator yang ditetapkan pada Disnakertrans Provinsi Jawa Timur adalah Persentase penyerapan tenaga kerja dengan formulasi perhitungan *Jumlah penyerapan tenaga kerja formal dan informal di sektor ketenagakerjaan dibagi Jumlah pengangguran*, sedangkan pada Kementerian Tenaga Kerja indikator yang ditetapkan adalah Persentase produktivitas tenaga kerja.

Capaian kinerja indikator urusan penanaman modal yang dapat dibandingkan dengan capaian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur adalah indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan terealisasi sebesar 87,46 sedangkan capaian IKM pada DPMPTSP Provinsi terealisasi sebesar 88,47. Adapun indikator Persentase peningkatan nilai investasi daerah dan Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik tidak dapat dibandingkan karena Provinsi tidak menetapkan indikator tersebut. Indikator kinerja yang ditetapkan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur adalah Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal, Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun kinerja Kementerian Investasi yaitu Nilai investasi nasional terealisasi sebesar 307,8 Trilyun dan realisasi investasi tingkat provinsi Jawa Timur terealisasi 25,9 Trilyun, sedangkan realisasi investasi kota Malang sebesar 700,35 Milyar.

#### **5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.**

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran strategis 1 :

Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat cukup berhasil yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 70,97%, dengan 1 indikator belum dapat mencapai target seperti yang ditetapkan dalam rencana strategis. Beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah:

- 1) Indikator 1 : Rasio daya serap tenaga kerja tercapai sebesar 17,03% dari target sebesar 70. Tidak tercapainya indikator ini karena:

- a) Kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perusahaan yang belum optimal sehingga penyerapan tenaga kerja baru masih sangat terbatas.
  - b) Terbatasnya kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan klaster kompetensi sehingga kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.
  - c) Terbatasnya jumlah pejabat fungsional ketenagakerjaan mengakibatkan kurang maksimal dalam fasilitasi pelatihan keterampilan dan penempatan tenaga kerja pada sektor formal.
- 2) Indikator 2 : Persentase peningkatan nilai investasi daerah tercapai 124,91% melebihi target sebesar 3,90%. Nilai investasi mengalami kenaikan dan melebihi dari target yang ditetapkan yang ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta pelaksanaan program kegiatan pengembangan iklim penanaman modal melalui penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi, promosi investasi serta pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Namun demikian, diperlukan dukungan dari stakeholder terkait agar potensi dan iklim investasi semakin kondusif sehingga mampu menarik minat investor yang lebih besar.
- b. Sasaran strategis 2 :
- Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif dengan 1 indikator kinerja sasaran yaitu Rasio Penduduk yang bekerja menunjukkan predikat berhasil dengan nilai capaian 98,13% dari target sebesar 94,10%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh:
- 1) Terlaksananya pembinaan stakeholder ketenagakerjaan secara optimal melalui beberapa program kegiatan diantaranya Koordinasi pengusaha dan pekerja melalui rapat LKS Tripartit,

Pembahasan UMK, pembinaan dan pencegahan perselisihan hubungan industrial, serta fasilitasi/mediasi kasus perselisihan hubungan industrial.

- 2) Penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar melalui beberapa program kegiatan diantaranya fasilitasi penempatan tenaga kerja (Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Negara) melalui pengelolaan informasi pasar kerja dan job far active.
- 3) Terbatasnya jumlah pejabat fungsional ketenagakerjaan mengakibatkan kurang maksimal dalam fasilitasi penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial bagi perusahaan dan pekerja.

c. Sasaran strategis 3 :

Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan 1 indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik menunjukkan predikat berhasil dengan nilai capaian 96,58% dari target sebesar 3,8. Belum maksimalnya capaian sesuai yang diperjanjikan karena belum seluruh layanan publik terlayani secara elektronik dan layanan publik yang sudah masuk dalam sistem aplikasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat daerah terkait. Indikator kinerja ini didukung oleh terlaksananya program kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.

d. Sasaran strategis 4 :

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan 1 indikator kinerja sasaran yaitu Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan menunjukkan predikat berhasil dengan nilai capaian indikator sebesar 98,27% dari target sebesar 89. Capaian ini didukung oleh:

- 1) Terlaksananya program kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata, sosial budaya dan pekerjaan umum.
- 2) Pembangunan Mal Pelayanan Publik “Merdeka” menjadikan layanan perizinan dan nonperizinan lebih mudah dijangkau

masyarakat karena mengakomodir berbagai layanan publik dari berbagai instansi layanan serta berlokasi pada titik 0 Kota Malang sehingga memudahkan masyarakat dalam menjangkau berbagai jenis layanan publik.

- 3) Pengembangan aplikasi perizinan online yang selalu diupgrade untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas proses perizinan yang lebih mudah, transparan dan terjangkau.
  - 4) Fasilitasi/pendampingan perizinan online baik melalui Si-IZOL maupun OSS bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengajuan izin.
  - 5) Pelayanan perizinan mobil keliling untuk memudahkan dan mendekatkan jangkauan masyarakat dalam memperoleh layanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Sasaran strategis 5 :

Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran yaitu Nilai SAKIP menunjukkan predikat berhasil dengan nilai capaian 106,97% melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,80. Indikator kinerja ini didukung oleh terlaksananya program kegiatan pelayanan kesekretariatan yang meliputi perencanaan kinerja sesuai ketentuan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja yang ditetapkan, pengembangan inovasi dan budaya kerja untuk perbaikan kinerja yang lebih baik, serta evaluasi dan pelaporan kinerja untuk mengukur ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

**Tabel 3.5**  
**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerjayang kompeten dan nilai penanaman modal	1. Rasio daya serap tenaga kerja	70,00	11,92	17,03	1.785.390.734	1.776.935.300	99,53	17,11
		2. Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,90%	4,87%	124,87	106.620.000	104.245.675	97,77	127,72
		Rata-rata sasaran 1						70,97	
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	1. Rasio penduduk yang bekerja	94,10%	92,34%	98,13	291.030.000	283.466.000	97,40	100,75
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	3,80	3,67	96,58	570.075.000	544.859.204	95,58	101,05
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89,00	87,46%	98,27	1.217.901.670	1.159.706.975	95,22	103,20
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	81,80	87,50	106,97	16.409.122.067	14.315.010.331	87,24	122,62
<b>Total</b>					<b>94,18</b>	<b>20.380.139.471</b>	<b>18.184.223.485</b>	<b>89,23</b>	<b>105,55</b>

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa penggunaan anggaran yang belum optimal, namun secara keseluruhan terdapat efektifitas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sebesar 105,55%. Adapun rincian efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Rasio daya serap tenaga kerja dengan capaian kinerja 17,03% dan capaian anggaran 99,53%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,47% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 17,11%
- 2) Indikator Persentase peningkatan nilai investasi daerah dengan capaian kinerja 124,91% dan capaian anggaran 97,77%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2,23% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 127,72%.
- 3) Indikator Rasio Penduduk yang bekerja capaian kinerja 98,13% dan capaian anggaran 98,13%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 2,60% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 100,75%.
- 4) Indikator Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik dengan capaian kinerja 96,58% dan capaian anggaran 95,58%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4,42% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 101,05%.
- 5) Indikator Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja 98,27% dan capaian anggaran 95,22%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4,78% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 103,20%.
- 6) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 106,97% dan capaian anggaran 87,05%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 12,76% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 122,62%.



**7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

**Tabel. 3.6  
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	17,03%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	1,55%	155%	Pelaksanaan pelatihan kompetensi bagi pencari kerja dari masyarakat untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	124,91%		Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	65,00%	100,00%	153,85%
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase realisasi Penanaman Modal	75,00%	50,52%	67,36%	a. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM b. Melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan fasilitasi pelaporan LKPM
					Persentase peningkatan jumlah minat investor	50%	50%	100%
Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	98,13%	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	77%	59,58%	77,38%	Dilakukan koordinasi dengan Provinsi dan Pusat terkait negara yang sudah siap menerima CPMI serta memaksimalkan penempatan antar kerja lokal (AKL)
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10,18%	17,31%	170,09%	Melakukan pembinaan berkesinambungan kepada perusahaan



Susunan Strategi	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rencana tindak lanjut
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	104,86%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Wajib LKPM	75%	5,54%	7,39%	a. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM b. Melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan fasilitasi pelaporan LKPM
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	80%	31,01%	34,35%	Pengembangan aplikasi perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan dinas yang terintegrasi dengan perangkat daerah terkait
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	96,58%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	87,5%	73,77%	84,30%	Melakukan pendampingan permohonan perizinan secara online kepada masyarakat dan Memproses perizinan dan nonperizinan sesuai SP dan SOP pelayanan yang telah ditetapkan
				Persentase penerbitan izin dan non izin Pekerjaan Umum	87,5%	85,56%	97,78%	Memproses perizinan dan nonperizinan sesuai SP dan SOP pelayanan yang telah ditetapkan
				Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	5,55%	5,55%	Pemrosesan IMB beralih menjadi PBG dan menjadi Kewenangan DPUPRKP
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	106,97%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	
				Nilai survey kepuasan internal	80	87,46	109,33%	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%	97,42%	121,77%	

**Tabel 3.7**  
**Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan**

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEHATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
PROGRAM PELATIHAN KERJADAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Persentase tenagakerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi - Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	155  153,85	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	415 orang	415 orang	100,00	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktivitas	279 orang	279 orang	100,00	
				Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	136 orang	136 orang	100,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	77,38	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	33 BKK	34 BKK	103,03	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	80 orang	80 orang	100,00	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	465 lowongan	595 lowongan	127,96	
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	35 perusahaan	35 perusahaan	100,00	
			Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	34 orang	34 orang	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta sosialisasi perlindungan PMI dan PPTKIS	34 orang	34 orang	100,00	
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b>	<b>171,88</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaandan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaanyang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan</b>	<b>10%</b>	<b>12,68%</b>	<b>126,80</b>	
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	jumlah peserta bimtek	80 orang	80 orang	100,00	
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusehaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)</b>	<b>67%</b>	<b>50,00%</b>	<b>74,63</b>	<b>Melakukan pembinaan, pendampingan dan pemantauan terhadap perusahaan di Kota Malang</b>
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang erakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan	80 orang	74 orang	92,50	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil LKS Tripartit	2 dokumen	2 dokumen	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi penanaman modal	67,36	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peneta pan pemberian fasilitas/iisentif di bidang penanaman modal	- dokumen	- dokumen	0,00	
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Ranperda / Ranperwal yang disusun	- dokumen	- dokumen	0,00	Penyusunan Ranperwal dilaksanakan oleh Dinas Teknis sehingga anggaran dialihkan untuk pemenuhan sarpras MPP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	100,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kali	1 kali	100,00	Menyiapkan keikutsertaan pameran investasi tahun mendatang
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah keikutsertaan dalam gelar pameran investasi	1 kali	1 kali	100,00	
				Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	100,00	
				Jumlah profil yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum	99,12	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum sesuai standar	5.000 Izin	6.581 Izin	131,62	
	Persentase Penerbitan ijin dan non ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	84,30		Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan Ekonomi, pariwisata dan sosial budaya sesuai standar	5.000 Izin	6.709 Izin	134,18	
	Persentase realisasi target retribusi IMB	5,55		Persentase IMB yang terbit	100 %	583 PBG		Proses pelayanan IMB beralih menjadi PBG dan dilaksanakan oleh DPU PRKP
				Persentase pengaduan yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan nonperizinan pekerjaan umum yang diterbitkan	5.000 Izin	6.581 Izin	131,62	
				Jumlah perizinan dan Non Perizinan Ekparsosbud yang diterbitkan	5.000 Izin	6.709 Izin	134,18	
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pengajuan ijin yang ditinjau	1100 Berkas	470 Berkas	42,73	
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan yang ditangani	50 pengaduan	64 pengaduan	128,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	100,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	23 perusahaan	142 perusahaan	617,39	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Profil hasil pemantauan LKPM	- proyek	- proyek	0,00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi	245 orang	300 orang	122,45	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penanaman modal	9 kali	12 kali	133,33	
				Profil hasil Pengawasan dan BAP	20 proyek	20 proyek	100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	34,45	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	90 %	100 %	111,11	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fitur	7 fitur	7 fitur	100,00	



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
				Jumlah data yang diolah	8.000 data	11.726 data	146,58	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
				Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	1 dokumen	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja dan ikhtisar realisasi	10 dokumen	10 dokumen	100,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	2 dokumen	100,00	
				Jumlah dokumen SKM	2 Dokumen	2 dokumen	100,00	
				Jumlah sertifikasi	1 sertifikasi	1 sertifikasi	100,00	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	66 orang	66 orang	100,00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5 laporan	5 laporan	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
	Nilai Survey Kepuasan Internal	113,38	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen tase pegawai yang terfasilitas layanan kepegawaian	80 %	75 %	93,75	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	- stel	0 stel	0,00	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	66 orang	67 orang	101,52	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80 %	100 %	125,00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	5 jenis	100,00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor	34 jenis	34 jenis	100,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	11 jenis	100,00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	720 eks	720 eks	100,00	
				Jumlah perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	100,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	5.183 kotak	5540 kotak	106,89	
				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	50 kali	106,38	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan pustaka	750 berkas	750 berkas	100,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	100,00	



PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	BENCANA TINDAK LANJUT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100,00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	750 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	100,00	
				Luasan ruangan yang dibersihkan	5.600 m <sup>2</sup>	5600 m <sup>2</sup>	100,00	
				Jumlah bahan dan alat	17 jenis	17 jenis	100,00	
	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>119,93</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terinventarisir</b>	<b>80 %</b>	<b>97 %</b>	<b>121,25</b>	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	2 laporan	2 laporan	100,00	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100,00</b>	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	35 jenis	28 jenis	80,00	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>80 %</b>	<b>90 %</b>	<b>112,50</b>	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	41 unit	41 unit	100,00	
				Jumlah volume BBM dan pelumas	20.160 liter	20.160 liter	100,00	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen revisi DED MPP	1 paket	1 paket	100,00	
				Luasan gedung kantor yang dipelihara	m2	0 m2	0,00	
				Rehabilitasi MPP	1 paket	1 paket	100,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	100,00	

- a. Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

**Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal.**

a) **Indikator 1 : Rasio daya serap tenaga kerja**, dengan target 70 baru terealisasi sebesar 11,92 dengan capaian sebesar 17,03%. Indikator ini ditunjang oleh program Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Belum tercapainya target kinerja dipengaruhi oleh kondisi pemulihan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perusahaan yang belum optimal sehingga penyerapan tenaga kerja baru masih sangat terbatas. Disamping itu terbatasnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan klaster kompetensi bagi pencari kerja sehingga kompetensi tenaga kerja yang tersedia belum sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.

b) **Indikator 2 : Persentase peningkatan nilai investasi daerah**, dengan target 3,90% telah terealisasi sebesar 4,87% dengan capaian sebesar 124,91% Indikator ini dapat terlaksana melalui program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal, yaitu Pelaksanaan promosi investasi dalam rangka menyampaikan potensi investasi kota Malang serta adanya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi para investor.

**Sasaran2 : Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif.**

**Indikator : Rasio Penduduk yang bekerja**, dengan target 94,10% telah berhasil terealisasi sebesar 92,34%

dengan capaian sebesar 98,13%. Indikator kinerja ini dapat tercapai melalui Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Penempatan kerja mulai mengalami perkembangan karena beberapa negara penerima PMI/TKI mulai menerima tenaga kerja serta adanya penempatan kerja sektor informal pasca pelatihan kerja.

**Sasaran 3 : Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

**Indikator : Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik,** dengan target 3,8 telah berhasil terealisasi sebesar 3,67 dengan capaian sebesar 96,58%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dimana telah dilaksanakan pengembangan aplikasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang akan diintegrasikan dengan perangkat daerah terkait.

**Sasaran4 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.**

**Indikator : Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan,** dengan target 89 telah berhasil terealisasi sebesar 87,46 dengan capaian sebesar 98,27%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pelayanan Penanaman Modal, yaitu Pelayanan dan pendampingan perizinan dan nonperizinan berbasis online system bagi masyarakat dan program jemput bola dalam memberikan layanan perizinan hingga ke tingkat kecamatan/kelurahan melalui mobil layanan keliling.

**Sasaran5 : Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah.**

**Indikator : Nilai SAKIP**, dengan target 81,80 telah berhasil terealisasi sebesar 87,50 dengan capaian sebesar 106,97%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu terlaksananya sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan dan keuangan sesuai ketentuan serta pengembangan inovasi dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja perangkat daerah.

**B. REALISASI ANGGARAN.**

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 89,23% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 3.8  
Realisasi Anggaran  
Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
I.	<b>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal</b>	<b>1.892.010.734</b>	<b>1.881.180.975</b>	<b>99,43</b>
1.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.785.390.734</b>	<b>1.776.935.300</b>	<b>99,53</b>
1.1.	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>1.715.390.734</b>	<b>1.706.935.300</b>	<b>99,51</b>
1.1.1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.715.390.734	1.706.935.300	99,51
1.2.	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100,00</b>
1.2.1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	70.000.000	70.000.000	100,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			<b>0,00</b>
2.1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00
2.1.1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	0,00
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>106.620.000</b>	<b>104.245.675</b>	<b>97,77</b>
3.1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	106.620.000	104.245.675	97,77
3.1.1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	106.620.000	104.245.675	97,77
<b>II</b>	<b>Sasaran 2 : Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif</b>	<b>291.030.000</b>	<b>283.466.000</b>	<b>97,40</b>
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>78.180.000</b>	<b>77.166.000</b>	<b>98,70</b>
4.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	45.700.000	45.686.000	99,97
4.1.1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	45.700.000	45.686.000	99,97
4.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	23.580.000	22.580.000	95,76
4.2.1	Job Fair /Bursa Kerja	23.580.000	22.580.000	95,76
4.3	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	8.900.000	8.900.000	100,00
4.3.1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia	8.900.000	8.900.000	100,00
<b>5.</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>212.850.000</b>	<b>206.300.000</b>	<b>96,92</b>
5.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	43.590.000	43.140.000	98,97

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
5.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	43.590.000	43.140.000	98,97
<b>5.2</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>169.260.000</b>	<b>163.160.000</b>	<b>96,40</b>
5.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	43.590.000	42.690.000	97,94
5.2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	125.670.000	120.470.000	95,86
<b>III</b>	<b>Sasaran 3: Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	<b>570.075.000</b>	<b>544.859.204</b>	<b>95,58</b>
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>387.935.000</b>	<b>369.738.432</b>	<b>95,31</b>
<b>6.1</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>387.935.000</b>	<b>369.738.432</b>	<b>95,31</b>
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	0,00
6.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.536.400	348.225.132	99,34
6.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	37.398.600	21.513.300	57,52
<b>7.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>182.140.000</b>	<b>175.120.772</b>	<b>96,15</b>
<b>7.1</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>182.140.000</b>	<b>175.120.772</b>	<b>96,15</b>

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
7.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	182.140.000	175.120.772	96,15
<b>IV.</b>	<b>Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	<b>1.217.901.670</b>	<b>1.159.706.975</b>	<b>95,22</b>
<b>8.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.217.901.670</b>	<b>1.159.706.975</b>	<b>95,22</b>
<b>8.1</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.217.901.670</b>	<b>1.159.706.975</b>	<b>95,22</b>
8.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.215.051.670	1.156.917.075	95,22
8.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.000.000	1.940.000	97,00
8.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengeloan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	850.000	849.900	99,99
<b>V.</b>	<b>Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>16.409.122.067</b>	<b>14.315.010.331</b>	<b>87,24</b>
<b>9.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.409.122.067</b>	<b>14.315.010.331</b>	<b>87,24</b>
<b>9.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>181.264.540</b>	<b>181.263.900</b>	<b>100,00</b>
9.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.800.000	38.799.700	100,00
9.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.888.040	13.887.800	100,00
9.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.576.500	128.576.400	100,00



No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
<b>9.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.303.418.347</b>	<b>8.653.911.380</b>	<b>83,99</b>
9.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.274.798.347	8.625.374.480	83,95
9.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.620.000	28.536.900	99,71
<b>9.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.549.800</b>	<b>96,80</b>
9.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.700.000	4.549.800	96,80
<b>9.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>148.648.669</b>	<b>143.393.300</b>	<b>96,46</b>
9.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00
9.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.648.669	143.393.300	96,46
<b>9.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>935.209.858</b>	<b>915.687.047</b>	<b>97,91</b>
9.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.985.950	9.958.230	99,72
9.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.091.150	217.784.350	99,40
9.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	307.490.000	294.380.000	95,74
9.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.762.000	27.446.500	98,86
9.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	366.293.758	361.530.967	98,70
9.5.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.587.000	4.587.000	100,00
<b>9.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.593.813.407</b>	<b>1.501.740.588</b>	<b>94,22</b>
9.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.593.813.407	1.501.740.588	94,22
<b>9.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>529.757.636</b>	<b>397.642.592</b>	<b>75,06</b>
9.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.000.000	226.969.956	63,22
9.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.757.636	170.672.636	99,95
<b>9.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.712.309.610</b>	<b>2.516.821.724</b>	<b>92,79</b>

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
9.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	478.091.724	95,62
9.8.2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.162.615.000	2.001.289.000	92,54
9.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.694.610	37.441.000	75,34
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>20.380.139.471</b>	<b>18.184.223.485</b>	<b>89,23</b>



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis dan Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki kategori pencapaian “Berhasil” dengan rata-rata pencapaian sebesar 94,18%, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja program dan sasarannya. Sedangkan hasil capaian kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 89,23%.

Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam tahun 2022 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasi permasalahan yang dihadapi maka diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya serta koordinasi dengan unit kerja terkait agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam hal perencanaan anggaran diupayakan untuk lebih optimal dan berbasis kinerja. Disamping itu, perlu adanya inovasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya pelayanan Ketenagakerjaan, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel. Langkah kebijakan selanjutnya yang perlu diprioritaskan adalah meningkatkan penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melakukan koordinasi DISNAKER, PMPTSP KOTA MALANG  
TAHUN2022



dengan stakeholder dan instansi terkait baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi serta pusat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang lebih kompeten dan agar dapat terserap di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor formal. Dalam optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain Layanan Publik diperlukan koordinasi dan kolaborasi dalam pengintegrasian sistem layanan publik dengan perangkat daerah terkait.

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1  
PERUBAHANRENCANA  
STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023  
(TABEL 4.1)

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2018-2023**



**KOTA MALANG**

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Tujuan

Penetapan tujuan sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan tujuan tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kedua yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan, Misi Ketiga Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat rentan dan Gender, serta pada misi Keempat adalah Memastikan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mengacu pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Malang untuk periode 2018-2023 sebagai berikut:

Misi 2 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Produktifitas dan Daya Saing Daerah yang merata dan berkelanjutan
- Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
- Indikator : Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif

Misi 3 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak Masyarakat Rentan dan Gender.
- Indikator : Persentase Penurunan PMKS
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial

Misi 4 Kota Malang :

- Tujuan : Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, professional dan akuntabel
- Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas system kelembagaan yang efektif
- Indikator : Nilai SAKIP, Opini BPK, Maturitas SPIP dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
- Sasaran 4 : Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi
- Indikator : Indeks kematangan SPBE

Dari uraian tersebut diatas maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, menetapkan tujuan untuk kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut:



“Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel”

Sedangkan untuk Indikator Tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah :

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2. Predikat WBK

b. Sasaran

Telah diuraikan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan perlu disusun sasaran dan indikatornya agar dapat diketahui tingkat capaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu maka setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk kurun waktu 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal  
Indikator :
  - Rasio Daya serap tenaga kerja
  - Persentase peningkatan nilai investasi daerah.
2. Meningkatnya Penempatan Kerja dan hubungan industrial yang kondusif  
Indikator :
  - Rasio penduduk yang bekerja.
3. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Indikator:
  - Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
Indikator :
  - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.
5. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - Nilai SAKIP.

Selanjutnya Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perijinan dan non perijinan yang akuntabel		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		65,94						72	
			Predikat WBK								75	
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	38,73	63,91	63,91	65	67	70	73	73		
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah			3,6 %	3,7 %	3,8 %	3,9 %	4,0 %	4,0 %		
	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja		93,21%	93,21%	93,50%	93,80%	94,10%	94,40%	94,40%		
	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			2,5	3	3,5	3,8	4,5	4,5		
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	88,5	88,8	89	89	89		
Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	79,66	81,65	81,65	81,75	81,76	81,80	81,85	81,85			

LAMPIRAN 2  
PERJANJIAN KINERJA  
DAN  
PERUBAHAN PERJANJIAN  
KINERJA TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI MAHMUDAH, SE, MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2022

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

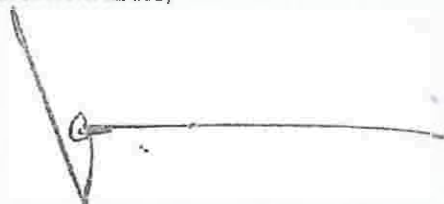
SITI MAHMUDAH, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690324 199603 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal	1. - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja - Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	70 3,9 %
2.	Meningkatnya Penempatan Kerja dan Hubungan Industri yang kondusif	2. Rasio penduduk yang bekerja.	94,10%
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3. Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.	3,8
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.	80
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5. Nilai S.A.M.P	81,86

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.415.039.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp 300.053.550,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 85.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program Hubungan Industrial	Rp 255.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 110.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.347.246.450,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 459.415.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK)
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 120.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

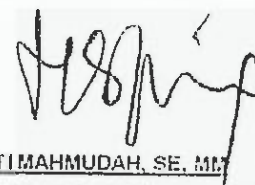
WALIKOTA MALANG,



Drs. H. SUTIAJ

Malang, Januari 2022

PIL. KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**SITI MAHMUDAH, SE, M.P.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690324 199603 2 002



## PEMERINTAH KOTA MALANG

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP. MSi

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 20 Oktober 2022



KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ARIF TRISASTYAWAN, S.STP, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang kompeten dan Nilai Penanaman Modal	1. - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja - Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	70 3,9 %
2.	Meningkatnya Penempatan Kerja dan Hubungan Industri yang kondusif	2. Rasio penduduk yang bekerja.	94,10%
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3. Indeks Layanan SPBE pada aspek Pelayanan Publik.	3,8
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.	89
5.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5. Nilai SAK P.	8,13

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.409.122.067,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp 1.785.390.784,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DBHCHT
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 78.180.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program Hubungan Industrial	Rp 212.850.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp -	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 106.620.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.217.901.670,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 387.935.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK)
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 182.140.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Malang, 20 Oktober 2022



Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
 PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ARIF TRISASTYAWAN, S.STP, MSI  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19790709 199810 1 001



LAMPIRAN 3  
PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2022

**PENGUKURAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Kinerja Tahun 2021							
				Tribulan I		Tribulan II		Tribulan III		Tribulan IV	
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja	70	43,58	62,26	43,58	62,26	64,45	92,07	11,92	17,03
		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	3,90%	126,12%	3233,85	-80,69%	-2068,97	-52,75%	-1352,56	4,87%	124,91
2.	Meningkatnya penempatan kerja dan hubungan industrial yang kondusif	Rasio penduduk yang bekerja	94,10%	90,35%	96,01	90,35%	96,01	90,35%	96,01	92,34%	98,13
3.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	3,80	3,67	96,58	3,67	96,58	3,67	96,58	3,67	96,58
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	89,00	95,94	107,80	90,29	101,45	88,45	99,38	87,46	98,27
5.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	81,80	84,60	103,42	84,60	103,42	87,50	106,97	87,50	106,97

30 Januari 2023  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**M. TRI SASRYAWAN, S.STP., M.Si.**

Pegawai Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001

LAMPIRAN 4  
BUKTI DUKUNG CAPAIAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmptsp@malangkota.go.id)

MALANG

Kode Pos 65132

1.1. Rasio daya serap tenaga kerja

$$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA}}{\text{Jumlah Perusahaan PMDN/PMA}} = \frac{122.764}{10.299} = 11,92$$

Malang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIETRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmpptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpptsp@malangkota.go.id)

MALANG

Kode Pos 65132



DATA PENDUKUNG DAYA SERAP TENAGA KERJA

KOTA MALANG TAHUN 2022

BULAN	NIB TERBIT	JUMLAH ID PROYEK	JUMLAH TENAGA KERJA
Januari	715	2.029	8.766
Februari	638	1.985	8.306
Maret	922	2.350	11.941
April	643	2.306	13.739
Mei	465	1.258	4.520
Junl	1.031	2.356	12.469
Juli	865	2.636	13.821
Agustus	748	1.893	9.982
September	1.139	2.402	9.098
Oktpber	1.072	2.430	8.851
November	1.110	2.816	9.295
Desember	951	2.160	11.976
JUMLAH	10.299	26.621	122.764

$$\text{Daya serap tenaga kerja} = \frac{122.764}{10.299} = 11,9$$

Malang, 31-12-2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19790709 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmpmsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpmsp@malangkota.go.id)

MALANG

Kode Pos 65132

1.2. Persentase peningkatan nilai investasi daerah

$$\frac{\text{Nilai investasi daerah tahun } n - \text{Nilai investasi daerah tahun } n-1}{\text{Nilai investasi daerah tahun } n-1} \times 100\% =$$

$$\frac{700.353.745.000 - 667.820.200.000}{667.820.200.000} \times 100\% = 4,87\%$$

Malang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARI TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A Telp. (0341) 751942  
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpptsp@malangkota.go.id  
MALANG KodePos : 65132

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI  
TAHUN 2022

TRIWULAN	PMDN	PMA	JUMLAH	KETERANGAN
TWI	126.146.100.000	2.861.390.000	129.007.490.000	
TWII	169.417.900.000	17.628.975.000	187.046.875.000	
TWIII	132.246.900.000	5.470.220.000	137.717.120.000	
TWIV	239.331.200.000	7.251.060.000	246.582.260.000	
<b>Total</b>	<b>667.142.100.000</b>	<b>33.211.645.000</b>	<b>700.353.745.000</b>	*estimasi kurs \$1 = Rp.14.350

Malang, 30 Desember 2022



ARI TRIGASTYAWAN, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

Realisasi investasi tahun 2021

DATA REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)  
DI KOTA MALANG TAHUN 2021

NO.	SEKTOR	JUMLAH PROYEK		NILAI REALISASI INVESTASI	
		PMDN	PMA	PMDN (Rp.)	PMA(USD)
1	Industri Makanan	12	-	436.421.800.000	-
2	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	7	-	81.640.800.000	-
3	Hotel dan Restoran	46	17	63.661.600.000	805.900
4	Listrik, Gas dan Air	2	-	30.051.100.000	-
5	Perdagangan dan Reparasi	196	10	16.274.300.000	588.100
6	Jasa Lainnya	49	9	9.953.700.000	501.100
7	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	10	-	1.475.100.000	-
8	Konstruksi	19	-	1.321.200.000	-
9	Industri Kimia dan Farmasi	5	-	204.800.000	-
10	Tanaman Pangan, Perkebunan dan peternakan	1	-	174.400.000	-
11	Pertambangan	2	-	110.000.000	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>349</b>	<b>36</b>	<b>641.288.800.000</b>	<b>1.895.100</b>

Jumlah Realisasi PMDN = Rp 641.288.800.000  
Jumlah Realisasi PMA (dalam usd) = Rp 265.314.000.000 (Kurs 1 USD = Rp. 14.000)  
Jumlah Realisasi Penanaman Modal (PMDN + PMA) = Rp 667.820.200.000

Malang, Pebruari 2022

Pt. KEPALA DINAS PERENCANAAN, KETERANGAN, KEMASYARAKATAN, KEMERJA, PENANAMAN MODAL,  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



SITI NURMUDA, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690324 199603 2 002





PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmpmsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpmsp@malangkota.go.id)

MALANG

Kode Pos 65132

## 2. Rasio penduduk yang bekerja

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% = \frac{418.158}{452.836} \times 100\% = \mathbf{92,34\%}$$

Malang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020 - Ags 2021		Perubahan Ags 2021 Ags 2022	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Penduduk Usia Kerja	708.621	713.338	717.831	4.717	0,66	-4.493	0,63
Angkatan Kerja	470.610	482.172	452.836	11.562	2,40	-29336	-6,48
- Bekerja	425.368	435.630	418.158	10.262	2,36	-17472	-4,18
- Pengangguran	45.242	46.542	34.678	1.300	2,79	-11864	-34,21
Bukan Angkatan Kerja	238.011	231.166	264.995	-6845	-2,96	33829	12,77
	person	person	person	person poin		person poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,61	9,65	7,66	0,04		-1,99	
- Laki-Laki	11,36	11,32	9,12	-0,04		-2,20	
- Perempuan	7,23	7,37	5,41	0,14		-1,97	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,41	67,59	63,08	1,18		-4,51	
- Laki-Laki	78,21	79,74	78,04	1,53		-1,70	
- Perempuan	55,10	55,95	48,74	0,85		-7,21	



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

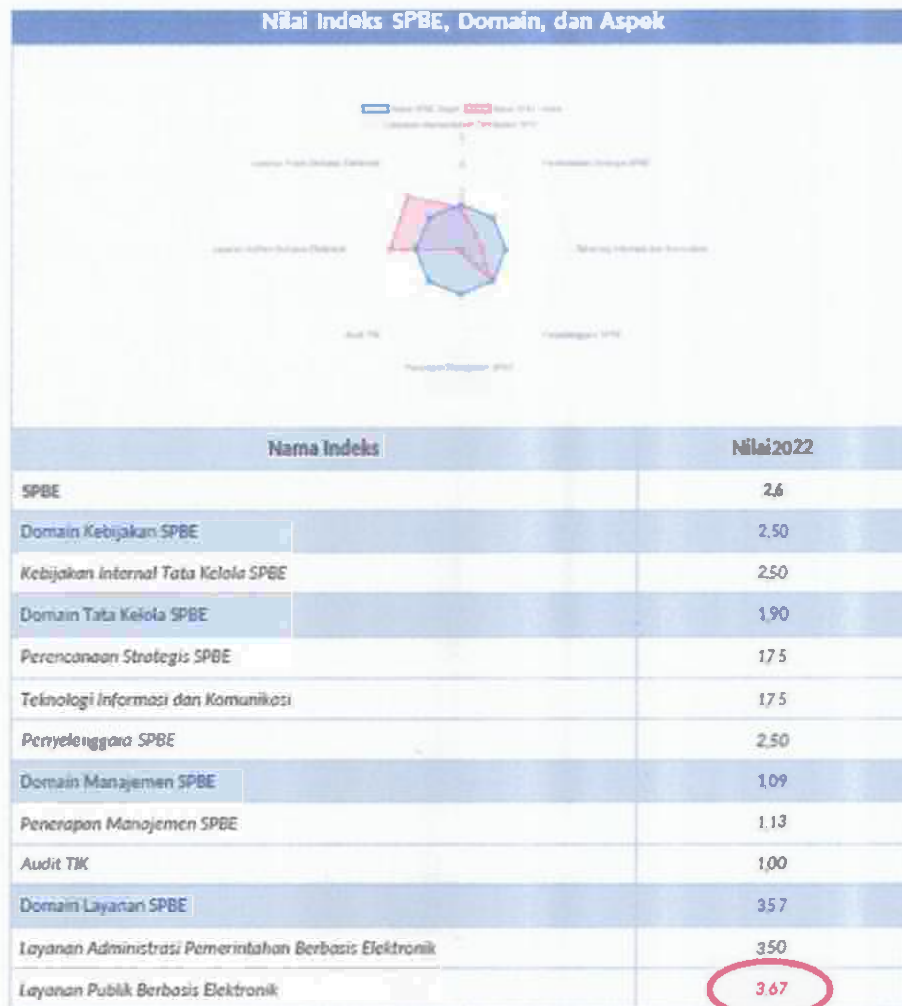


Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmpmsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpmsp@malangkota.go.id)

MALANG

Kode Pos 65132

3. Indeks kematangan SPBE pada aspek pelayanan publik



Malang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmpmsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpmsp@malangkota.go.id)

**MALANG**



Kode Pos 65132

**4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan  
Nilai SKM Januari s.d Desember 2022**

The screenshot displays the 'SI-IZOL' web interface. The main content area is titled 'Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat' and shows a table of survey results. The table has columns for 'Indikator', 'Nilai', and 'Kategori'. The 'Informasi' sidebar on the right shows the total number of respondents (983), the average score (87.46), and the overall index score (3.5).

Indikator	Nilai	Kategori
Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas pelayanan dengan menggunakan layanan ini	86,37	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang keabsahan prosedur pelayanan di unit ini	86,19	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan waktu dalam melayani pelayanan	82,93	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan dan ketepatan pelayanan	95,7	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang melayani	85,66	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan dalam melayani keluhan dan pengaduan	57,43	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan dalam melayani keluhan dan pengaduan	85,81	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	84,18	A - SANGAT BAIK
Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	94,97	A - SANGAT BAIK

Malang, 30 Januari 2023  
KORAN DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,  
  
**ANIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si.**  
Pemimpin Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : [disnakerpmpmsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmpmsp@malangkota.go.id)

MALANG

Kode Pos 65132

5. Nilai Evaluasi SAKIP

KOMPONEN		BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Jumlah		100,00	87,50

Malang, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF PRASASTYAWAN, S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790709 199810 1 001



# PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT

JALAN GAJAHMADA NOMOR 2A TELP. (0341) 364450 – FAX. 321276  
MALANG

Kode Pos 65113

Nomor : 700/826/35.73.300/2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Malang, 29 Juli 2022

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Disnaker PM-PTSP

Kota Malang

di

MALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Disnaker PM-PTSP Kota Malang dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP,
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
  - e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
  - a. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%),
  - b. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%),
  - c. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), dan
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%).Setiap Komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	<b>Sangat Memuaskan.</b> Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	>80-90	A	<b>Memuaskan,</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	>70-80	BB	<b>Sangat Baik,</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 37 Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	>60-70	B	<b>Baik,</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	>50-60	CC	<b>Cukup (Memadai),</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	>30-50	C	<b>Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	0-30	D	<b>Sangat Kurang,</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Disnaker PM-PTSP Kota Malang Tahun Anggaran 2022 menunjukkan kategori peringkat A (**Memuaskan**) dengan nilai sebesar **87,50**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	27,00
b. Pengukuran Kinerja	30 %	27,00
c. Pelaporan Kinerja	15 %	13,50
d. Evaluasi Internal	25 %	20,00
<b>Jumlah</b>	<b>100 %</b>	<b>87,50</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

**a. Perencanaan Kinerja**

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (P-RPJMD dan P-Renstra), dan jangka pendek (RKPD dan Renja). Serta dokumen Rencana Aksi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja Disnaker PM-PTSP Kota Malang menunjukkan nilai sebesar **27,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **90%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori **A (Memuaskan)**.

**b. Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja mencakup pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja Disnaker PM-PTSP Kota Malang menunjukkan nilai sebesar **27,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

**c. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja mencakup penilaian atas penyusunan Laporan Kinerja secara berkala yang direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.



Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Disnaker PM-PTSP Kota Malang menunjukkan nilai sebesar 13,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 90,00% dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

d. **Evaluasi Internal**

Evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas ketersediaan pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 20,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 80,00% dengan kategori peringkat **BB (Sangat baik)**.

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan target kinerja dan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya.
  - b. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja, dan Dokumen Laporan Kinerja secara tepat waktu pada website resmi Disnaker PM-PTSP Kota Malang;
  - c. Mencantumkan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Mentoring daerah lain terkait komponen perencanaan) pada Laporan Kinerja;
  - d. Melaksanakan upaya tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja Disnaker PM-PTSP Kota Malang ini, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan (saran) guna perbaikan untuk peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi.

INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG



Drs. **MILYONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650627 198602 1 004

LAMPIRAN 5  
PENGHARGAAN TAHUN 2022



PIAGAM PENGHARGAAN

# INOVASI TERBAIK

INTERNALISASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK TAHUN 2022

KATEGORI PELAYANAN ADMINISTRASI  
DIBERIKAN KEPADA

## INOVASI LUNAS (LAYANAN PRIMA UNTUK ANDA SEMUA)

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

# PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

**Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Malang**

Sebagai

**Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori "Sangat Baik"  
Tahun 2020**

Jakarta, 9 Maret 2021

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**



**Tjahjo Kumolo**





Walikota Malang

# *Diagam Penghargaan*

diberikan kepada :

**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL,  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

sebagai :

**PERINGKAT II**

atas kinerja pelayanan pengaduan Sambat Website dengan respon tercepat

Periode : Januari s/d Juni 2020

Malang, Juli 2020

WALIKOTA MALANG



Dis. H. SUTIAJI



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia

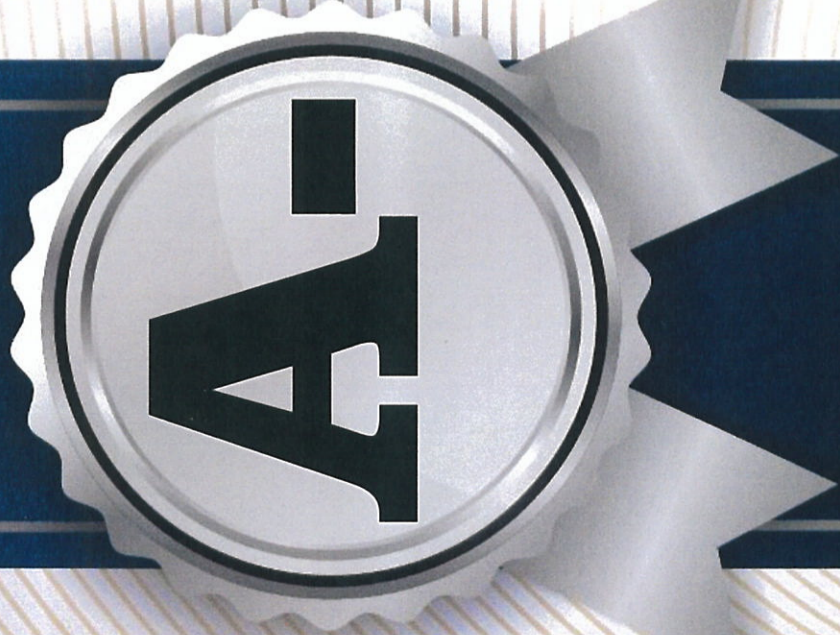
# Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Malang**

Sebagai

**Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik  
Kategori "Sangat Baik"  
Tahun 2019**



Jakarta, 22 November 2019



Tjahjo Kumolo